



## Seba Baduy: Komunikasi Antarbudaya dan Eksistensi Masyarakat Adat Kanekes

Pitriyani<sup>(1)</sup>, Wilodati<sup>(2)\*</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

<sup>1</sup>yanipitri56@upi.edu, <sup>2</sup>wilodati@upi.edu

### Abstract

*Industrialization and development carried out by the government and society often cause changes in land ecosystems that are detrimental to indigenous peoples who depend on the natural environment for their survival. There is a lack of communication and recognition of customary law and is a crucial problem in resolving conflicts between indigenous peoples and outside parties (such as the government, companies and the general public). So the importance of cultural elements can be used to resolve conflicts, maintain harmony and be a means of communication between indigenous peoples and outside parties. The Seba tradition is one of the local wisdoms that can create this balance with cross-cultural communication in its implementation. The aim of this article is to explore the meaning and function of the Seba ceremony as a tool for intercultural communication and the existence of the Kanekes indigenous community amidst the diversity of Indonesian society and preventing conflict. This article uses a literature review research method with a synthetic meta-analysis of literature discussing the Kanekes (Baduy) and Seba Baduy communities based on the results of observations and interviews. The results of the study show that the Seba tradition is a form of respect and cross-cultural communication with local governments in conveying ancestral messages in protecting nature, harmony and peace. Seba Baduy also becomes a venue for the Kanekes community's existence towards outside communities by displaying their identity and uniqueness through cultural symbols in a series of Seba ceremonies.*

**Keyword:** Intercultural Communication, Kanekes Society, Seba Baduy

### Abstrak

Industrialisasi dan pembangunan yang dilakukan pemerintah dan masyarakat sering kali menyebabkan perubahan ekosistem lahan yang merugikan masyarakat adat yang bergantung pada lingkungan alam untuk kelangsungan hidup mereka. Kurangnya komunikasi dan pengakuan atas hukum adat dan merupakan masalah krusial dalam menyelesaikan konflik antara masyarakat adat dan pihak luar, seperti pemerintah, perusahaan, dan masyarakat umum. Pentingnya elemen budaya yang dapat menjadi resolusi konflik, menjaga keharmonisan dan alat komunikasi antar masyarakat adat dan pihak luar tersebut. Tradisi Seba menjadi salah satu kearifan lokal yang dapat mewujudkan keseimbangan tersebut dengan adanya komunikasi lintas budaya dalam pelaksanaannya. Tujuan dalam artikel ini untuk menggali makna dan fungsi upacara Seba sebagai alat komunikasi antarbudaya dan eksistensi masyarakat adat Kanekes di tengah keragaman masyarakat Indonesia dan mencegah konflik. Artikel ini menggunakan metode penelitian kajian literatur dengan meta analisis sintesis dari literatur-literatur yang membahas masyarakat Kanekes (Baduy) dan Seba Baduy berdasarkan hasil observasi dan wawancara. Hasil studi menunjukkan bahwa tradisi Seba merupakan bentuk penghormatan dan komunikasi lintas budaya kepada pemerintah daerah dalam menyampaikan pesan-pesan leluhur dalam menjaga alam, keharmonisan dan kedamaian. Seba Baduy juga menjadi ajang eksistensi masyarakat Kanekes terhadap masyarakat luar dengan menampilkan identitas dan keunikan mereka melalui simbol-simbol budaya pada rangkaian upacara Seba.

**Kata Kunci:** Komunikasi Antarbudaya, Masyarakat Kanekes, Seba Baduy

Received : 17-05-2024

; Revised: 01-06-2024

; Accepted: 01-06-2024



## Pendahuluan

Masyarakat Kanekes dan kebudayaannya merupakan gambaran jelas bahwa Indonesia sebagai negara multikultural. Pandangan ini bukan dilihat dari seberapa banyaknya masyarakat Kanekes di masyarakat namun dinilai dari kerukunan antarmasyarakat yang saling memegang teguh prinsip hidup masing–masing meski terdapat banyak perbedaan yang mencolok. Keunikan dari setiap masyarakat adat merupakan harga tertinggi dari identitas yang dibangun dengan beragam bentuk yang autentik seperti pada masyarakat Kanekes/Baduy (Farakhiyah & Irfan, 2019). Masyarakat Kanekes/Baduy sendiri memiliki kekhasan, yaitu kehidupan mereka yang sangat menghadang modernitas dan teguh dalam mempertahankan identitas budaya mereka (Holilah & Heryatun, 2019).

Perbedaan prinsip dan hukum yang terjadi antara masyarakat adat dengan masyarakat umum seringkali menimbulkan perbedaan kepentingan yang mengarah pada polarisasi dan fragmentasi sosial. Kondisi ini akan memburuk jika pada akhirnya menciptakan konflik akibat adanya gesekan kepentingan–kepentingan tersebut (Farakhiyah & Irfan, 2019). Konflik yang melibatkan masyarakat adat selalu berkaitan dengan terenggutnya hak dan keadilan mereka atas pengakuan hukum dan wilayah adat, sehingga tidak sedikit masyarakat adat di Indonesia menjadi subjek pelanggaran HAM dan sengketa lahan/hutan (Utari, 2020). Misalnya, pengklaiman kawasan hutan masyarakat adat Humbang Hasundutan Siria-ria oleh pemerintah untuk membangun program lumbung pangan “*food estate*” nasional yang hingga saat ini masih menjadi polemik bagi masyarakat sekitar (Sinaga, 2024). Konflik perebutan Pulau Rumpang Batam yang melibatkan masyarakat suku Melayu, suku Laut dengan pemerintah dan PT. Makmur Elok Graha (Ardhi, 2023). Kemudian, kasus diskriminasi dan tidak diakuinya keyakinan masyarakat adat Sunda Wiwitan di Kabupaten Kuningan Jawa Barat sebagai bagian dari keragaman budaya Indonesia. Selain itu, konflik tersebut memburuk sejak banyak tanah ulayat mereka yang beralih fungsi dan berpindah menjadi milik pemerintah (Farakhiyah & Irfan, 2019).

Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) menyatakan bahwa konflik yang terjadi di kalangan masyarakat adat berakar pada ketidakpastian hukum mengenai pengakuan hak ulayat mereka. Pada beberapa kasus sengketa lahan, putusan hakim terkadang tidak mempertimbangkan hukum adat yang dianut masyarakat yang terlibat

seakan hukum negara tak berpihak pada masyarakat adat (Mawangi, 2022). Hairanyah, seorang Komisioner Komnas HAM, mengungkapkan bahwa terdapat tiga isu utama yang kerap melibatkan masyarakat adat, yaitu konflik agraria, pengakuan terhadap masyarakat adat oleh negara dan pemerintah, serta perlindungan bagi pembela HAM (*human rights defender*) (Utari, 2020). Sejumlah peraturan dan perundang-undangan dalam melindungi masyarakat adat sebenarnya sudah ada sejak dulu, misalnya Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat. Atau putusan MK No3/PUU-VIII/2010, No.31/PUU-V/2007 dan No.35/PUU-X/2012 tentang posisi masyarakat hukum adat. Namun, kenyataannya masih terdapat sekitar 23,17 juta hektar wilayah milik masyarakat hukum adat yang hingga kini belum diakui oleh pemerintah daerah dan terancam dialihfungsikan (Thea, 2023). Proses hukum yang berlangsung hanya bersifat *ad hoc* dan *parsial* sehingga kurang menyentuh akar persoalan konflik yang sebenarnya pada masyarakat adat (Pitriyani, 2019).

Masyarakat Kanekes/Baduy sebagai salah satu masyarakat adat yang terancam konflik agraria nampaknya memiliki sistem pengetahuan yang berbeda dengan masyarakat luas, pengetahuan tersebut merupakan alat esensial bagi mereka untuk mengatasi masalah yang dihadapi dari lingkungan alam (*natural environment*), budaya (*cultural environment*) maupun sosial (*social environment*) seperti yang terjadi pada kasus-kasus di atas (Rusnandar, 2013). Pendekatan dari “dalam” menjadi unsur penting dalam menjaga nilai-nilai budaya dan kedamaian antara masyarakat terlebih pada pihak luar seperti pemerintah. Tradisi *Seba* menjadi bagian dari pendekatan itu, upacara adat yang sarat akan makna dan nilai budaya seperti petuah, nasehat, dan amanah leluhur kepada pemimpin agar menjadi panutan rakyatnya, tidak sewenang-wenang dan tidak menyalahgunakan kekuasaan. Upacara *Seba* adalah bukti nyata pengakuan adat terhadap Bupati dan Gubernur, menandakan bahwa secara informal mereka dianggap sebagai pemimpin oleh masyarakat Kanekes, begitu pula pengakuan pemerintah terhadap hukum adat masyarakat Kanekes (Supriatna, 2012).

Upacara *Seba* merupakan ritual ucap syukur satu tahun sekali yang dilakukan masyarakat Kanekes saat panen raya tiba dengan melibatkan pemerintah. Masyarakat Kanekes membagikan hasil bumi mereka kepada pemerintah dan menjalin silaturahmi layaknya seorang anak yang mengunjungi orang tua. Adanya dialog terbuka antarkeduanya untuk mengemukakan harapan dan keresahan masyarakat Kanekes terhadap setiap peraturan dan kebijakan yang dibuat oleh

pemerintah. Sedangkan, bagi pemerintah sendiri adanya tradisi *Seba* menjadi produk wisata yang dapat meningkatkan pariwisata budaya di Banten (Desandro, 2021). Pentingnya tradisi *Seba* bukan hanya sekedar warisan leluhur yang wajib dilaksanakan setiap tahunnya, namun dimaknai sebagai pengakuan masyarakat Kanekes sebagai bagian dari pemerintahan (Indonesia) (Fitri, 2023). Dalam penelitian (Isnendes, Upacara *Seba* Baduy: Sebuah Perjalanan Politik Masyarakat Adat Sunda Wiwitan, 2016) melihat kegiatan *Seba* ini sebagai perjalanan politik masyarakat Kanekes untuk memperoleh pengakuan atas hukum adat dalam pemerintahan. Di sisi lain, tradisi *Seba* juga merupakan bentuk konstruksi identitas etnonasionalisme falsafah *Pikukuh* dan *Buyut* terhadap masyarakat Kanekes (Armawi & Susilawati, 2021).

Dari penelitian terdahulu tersebut, artikel ini menemukan titik kosong dalam memahami tradisi *Seba*, yaitu sebagai tradisi masyarakat adat yang melibatkan banyak pihak dan lintas budaya dalam mewujudkan keharmonisan di tengah perbedaan yang mencolok serta sebagai bentuk pencegahan terhadap konflik yang seringkali mengabaikan pengakuan atas hukum adat. Berdasarkan urgensi pada tradisi *Seba* tersebut, artikel ini tertarik untuk mendalami kearifan lokal *Seba Baduy* sebagai bentuk komunikasi antarbudaya dan eksistensi masyarakat Kanekes di tengah modernitas dan keragaman budaya di Provinsi Banten dalam membangun silaturahmi dan kedamaian antara masyarakat Kanekes, masyarakat umum, dan pemerintah daerah. Menurut Tubbs dan Moss dalam (Lagu, 2016) komunikasi lintas budaya adalah interaksi antara individu-individu yang memiliki latar belakang budaya berbeda, seperti ras, etnis, atau perbedaan sosial ekonomi. Selain itu, perbedaan latar belakang seseorang yang terlibat dalam suatu interaksi antara satu dengan yang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat dikatakan sebagai komunikasi antarbudaya, seperti pada proses rangkaian upacara tradisi *Seba* (Suranto, 2010).

## **Metodologi**

Pendekatan dalam artikel ini menggunakan jenis penelitian kajian literatur dengan mereview sumber–sumber literatur yang berhubungan dengan masyarakat adat suku Baduy atau Kanekes dan tradisi *Seba Baduy* untuk memperoleh data yang diperlukan (Arikunto 2013). Penelitian dilakukan dengan pengumpulan data pustaka dengan menggunakan kata kunci “Tradisi *Seba*” “*Seba* Baduy”, “Masyarakat Baduy/Kanekes”, “Komunikasi antarbudaya” pada *database Google Scholar*. Adapun

sumber data yang dimaksud berasal dari, buku, jurnal ilmiah, e-book, *website*, peraturan perundang-undangan, laporan, penelitian (skripsi/tesis/disertasi), dan sumber lainnya yang relevan dengan masalah penelitian, yaitu tradisi *Seba* sebagai komunikasi antarbudaya masyarakat Kanekes. Setelah literatur yang dibutuhkan terkumpul, lalu dibaca, dicatat dan menganalisisnya secara deskripsi sebagai langkah pengelolaan bahan penelitian terhadap temuan–temuan hasil studi literatur tersebut (Nazir 2014).

## **Hasil dan Pembahasan**

### ***Pikukuh Karuhun* Masyarakat Adat Kanekes di Tengah Modernitas**

*Urang Kanekes* yang juga dikenal sebagai Suku Baduy, adalah komunitas sub-etnis Sunda yang tinggal harmonis dengan alam di Pegunungan Kendeng, Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Banten. Wilayah yang mereka tinggali memiliki luas sekitar 5.101,85 hektar dengan populasi 5.000 hingga 8.000 orang, masyarakat Kanekes menjadi salah satu suku minoritas yang menerapkan isolasi diri dari dunia luar (Holilah & Heryatun, 2019). Masyarakat Kanekes terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu Tangtu yang dikenal sebagai Baduy Dalam, Panamping, atau Baduy Luar, serta Baduy Dangka. Mereka tersebar di beberapa kampung sekitar aliran sungai Ciujung dan Cikanekes, mencakup total 20 kampung dengan 17 kepala keluarga, dan tinggal di 99 rumah yang dikenal sebagai *Culah Nyanda*, yakni rumah panggung. Secara struktur adat, mereka terbagi menjadi dua golongan, yaitu Baduy Dalam dan Baduy Luar. Kelompok Tangtu atau Baduy Dalam, menetap di kampung Cibeo, Cikeusik, dan Cikartawana, di mana mereka tetap kokoh mematuhi tradisi adat mereka (Suparmini, Setyawati, & Suminar, 2013). Sedangkan Baduy Luar (termasuk Baduy Dangka) yang kini menjadi lintas pariwisata telah mengalami perubahan serta lebih terbuka terhadap dunia luar dan modernisasi.

Istilah "Baduy" yang sering digunakan oleh masyarakat umum sebenarnya bukan berasal dari komunitas Kanekes sendiri. Mereka cenderung lebih memilih untuk menyebut diri mereka sebagai '*Urang Kanekes*' atau '*Orang Kanekes*', atau menggunakan nama tempat tinggal mereka, yakni Desa Kanekes. Berdasarkan sejarah, sebutan 'Baduy' pertama kali digunakan oleh peneliti Belanda yang menyebut mereka sebagai *Badoe'i*, *Badoej*, *Badoewi* atau *Badawi* yang merupakan sebutan untuk kelompok masyarakat Arab yang berpindah–pindah (nomaden) di gurun pasir (Meilani, Syauta, & Sudarman, 2022). Selain itu, ada pandangan yang menyatakan

bahwa istilah Baduy memiliki hubungan erat dengan kata Buddha, yang dalam konteks ini diartikan sebagai tidak menganut agama Islam (Holillah & Heryatun, 2019). Hingga pada akhirnya sebutan 'Baduy' terus melekat pada masyarakat Kanekes.

Suku Baduy pada dasarnya adalah satu kelompok yang sama, yakni suku Baduy atau Kanekes. Masyarakat adat ini memegang teguh kepu'unan, *Pikukuh Karuhun*, dan kepercayaan pada Sunda Wiwitan, serta kepercayaan pada roh nenek moyang (animisme) (Muhibah & Rohimah, 2023). Namun, dengan berjalannya waktu dan perkembangan jaman mereka pun terbagi-bagi berdasarkan karakteristik mereka. Suku Baduy pun dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yaitu Baduy Dalam dan Baduy Luar. Keduanya pun kian menunjukkan perbedaannya terutama pada keterbukaanya terhadap dunia luar. Masyarakat Baduy Dalam menolak teknologi dan modernisasi dengan tegas, mempertahankan gaya hidup mereka yang sangat tradisional (Muhibah & Rohimah, 2023). Kelompok Baduy Dalam dicirikan dengan ikat kepala (*telekung*, *koncer* atau *roma*), baju tanpa kerah (*kutung*, *jamang sangsang*), kain *samping aros* (sarung warna nila bergaris putih) yang dipakai sebatas lutut kaki, ikat pinggang selendang kecil (*beubeur*) dan *buntelan* Buntelan putih yang melambangkan kesucian menjadi ciri khas orang Baduy Dalam yang masih mempertahankan keaslian budaya mereka tanpa terpengaruh oleh budaya luar. Sedangkan untuk masyarakat Baduy Luar atau Baduy Dangka dan Panamping dapat dikenali dengan tampilannya baju *kutung* hitam, *iket* kepala bercorak batik hitam/biru, celana pendek hitam atau *aros* dan *kantong koja* atau *jarog*, yaitu tas yang terbuat dari kulit kayu *teureup* (Isnendes, Upacara Seba Baduy: Sebuah Perjalanan Politik Masyarakat Adat Sunda Wiwitan, 2016).



(a)

(b)

**Gambar 1. Perbedaan Pakaian Adat Baduy/Kanekes (a) Baduy Dalam, (b) Baduy Luar**

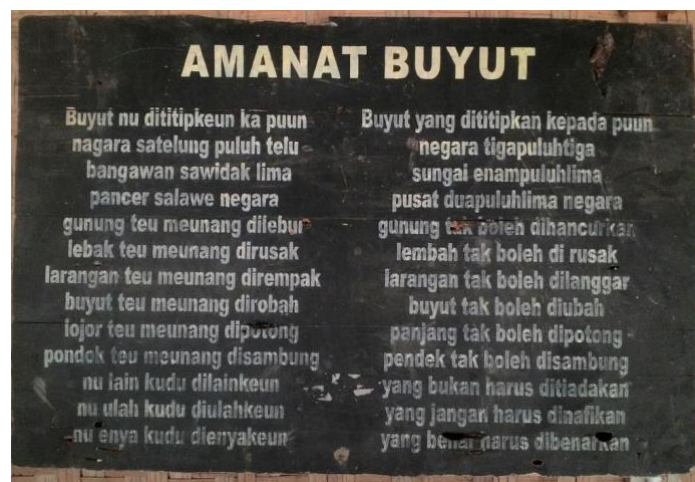
Sumber: Gambar (a) (Raja Wisata, 2023), Gambar (b) (Pawestri, 2023)

Perbedaan lainnya antara Baduy Dalam dan Baduy Luar adalah pembagian wilayah mereka tinggal. Kelompok Baduy Dalam dapat dijumpai di tiga kampung utama suku Baduy, yaitu Kampung Cibeo, Cikertawana, dan Cikeusik. Sedangkan Baduy Luar tersebar di 26 kampung, terdiri dari Kampung Kaduketug, Pamoean, Cibongkok, Sorokokod, Cigula, Gajeboh, Kaduketer, Cicatang, Cikopeng, Cihulu, Cicakal Girang, Cipaler, Cipiit, Karahkal, Cisagu, Babakan Ciranji, Cikadu, Cipeucang, Cicakal Muara, Cijanar, Batubeulah, Cipokol, Kadukohak, Cisaban, dan Batara (Muhibah & Rohimah, 2023).

Masyarakat Baduy, atau Urang Kanekes, menonjol sebagai suku yang masih teguh memegang nilai-nilai budaya mereka di tengah kemajuan peradaban yang mengelilingi mereka saat ini (Suparmini, Setyawati, & Suminar, 2013). Kehidupan sosial dan budaya *Urang Kanekes* dipengaruhi oleh dua lembaga, yaitu *Pu'un* (ketua adat) dan *Jaro Pamarentah*, yaitu seorang kepala desa yang dipilih langsung oleh *Pu'un* (Dahlan, 2019). Mereka masih menjalankan “*kepu'unan*” sebagai sistem kepemimpinan adat mereka. Ada tiga *Pu'un* yang diyakini merupakan kesatuan keturunan Batara yang tinggal di Cikeusik, Cikertawana dan Cibeo (Meilani, Syauta, & Sudarman, 2022). *Pu'un*, yang merupakan ketua adat, memiliki kedudukan yang setara dengan presiden dalam masyarakat Kanekes. Setiap individu dalam masyarakat diharapkan patuh terhadap nasihat dan perintah yang diberikan oleh *Pu'un* (Nadroh, 2018). Seorang *Pu'un* dibantu oleh *Jaro*, yaitu *jaro tangtu* sebagai wakil *pu'un* di wilayah Baduy Dalam sebagai juru bicara penghubung komunikasi dengan pemerintahan negara. Masyarakat Baduy Luar menggunakan sistem pemerintahan desa yang dikenal sebagai *jaro pamerintah*, didukung oleh *jaro tanggungan*, *tanggungan*, dan *baris kolot* (Suparmini, Setyawati, & Suminar, 2013). *Pu'un* dan para pembantunya ini bertugas dan bertanggung jawab untuk menjaga nilai-nilai leluhur mereka yang tertuang dalam *Pikukuh Karuhun*.

Sistem adat, budaya, dan tradisi masih mendominasi kehidupan masyarakat Kanekes, dengan tiga prinsip utama yang menjadi pedoman sehari-hari, yaitu menjalani kehidupan dengan sederhana, melestarikan alam, dan semangat kemandirian (Meilani, Syauta, & Sudarman, 2022). Panduan hidup dan nilai-nilai masyarakat Kanekes diatur dalam suatu peraturan yang dikenal sebagai *Pikukuh Karuhun*. Menurut Garna dalam (Ardiyansah & Robby, 2023) *pikukuh* merupakan aturan atau pedoman hidup masyarakat dalam berperilaku dan bersikap agar tidak melanggar perintah *karuhun* (nenek moyang). Larangan yang diturunkan dari leluhur

disebut 'buyut' yang dalam bahasa Sunda dapat diartikan sebagai 'cadu' atau 'pamali' yang berarti hal yang terlarang atau pantangan. *Pikukuh* merupakan ajaran suci yang memuat petuah, kewajiban, dan larangan, bertujuan untuk menjaga keselarasan dan harmoni antara kehidupan masyarakat dengan alam (Meilani, Syauta, & Sudarman, 2022). Salah satu aturan dari *Pikukuh Karuhun* tercantum pada *Amanat Buyut* yang diletakan pada setiap area pintu masuk ke kawasan perkampungan suku Baduy. *Amanat Buyut* tersebut menjadi peraturan yang wajib ditaati oleh seluruh masyarakat Kanekes maupun masyarakat luar yang memasuki kawasan hukum adat.



Keterangan:

#### AMANAT BUYUT

(Amanah Leluhur/Nenek Moyang)

Isi:

*Buyut nu dititipkeun ka puun  
Nagara satelung puluh telu  
Bangawan saeidak lima  
Pancer Salawe negara  
Gunung teu meunang dilebur  
Lebak teu meunang dirusak  
Larangan teu meunang dirempak  
Buyut teu meunang dirobah  
Lonjor teu meunang dipotong  
Pondok teu meunang disambung  
Nu lain kudu dilainkeun  
Nu ulah kudu diulahkeun  
Nu enya kudu dienyakeun*

Arti:

Buyut (petabuan, keramat, aturan) yang dititipkan kepada Puun  
Negara tiga puluh tiga  
Sungai enam puluh lima  
Pusat dua puluh lima negara  
Gunung (dataran tinggi) tak boleh dihancurkan  
Lembah (dataran rendah) tak boleh dirusak  
Larangan tak boleh dilanggar  
Buyut (petabuan, keramat, aturan) tak boleh diubah  
Panjang tak boleh dipotong  
Pendek tak boleh disambung  
Yang bukan harus ditiadakan  
Yang jangan harus dinafikan  
Yang benar harus dibenarkan

#### Gambar 2. Amanat Buyut (*Pikukuh Karuhun*) Masyarakat Kanekes/Baduy

Sumber: (Sumardjo, 2013)

Di dalam riwayat pantun Panggung Karaton, Prabu Siliwangi mempercayakan kepada putranya, Raden Wangi, sebuah peta untuk menemukan negeri yang dihiasi



33 pulau dan dilintasi sungai sebanyak 65, yang akan menjadi cikal bakal kerajaannya. Ungkapan semacam itu juga merajut kisah legendaris di Tangtu Baduy, dikenal dengan frase "*nagara satelung puluh teulu, bagawan sawidak lima, pancer salawe nagara*" seperti yang tercantum di atas (Sumardjo, 2013). Jika kita menguraikan makna dari angka-angka tersebut, 33 melambangkan satu negara pusat dan 32 negara bagian di sekitarnya yang tersebar di berbagai arah, 65 sungai menggambarkan satu sungai utama dan 64 sungai yang membelahnya, sementara di setiap 32 negara bagian tersebut, terdapat 25 kampung kecil yang mewakili satu pusat kampung dan 24 kampung di sekitarnya. Angka-angka tersebut semacam matematika Sunda yang dibaca dengan sistem Mandala, yaitu ruang manusia yang dihadiri oleh daya-daya transenden, kekuatan, kuasa, kesucian, kegaiban yang adikodrati (supranatural) pikukuh Sunda (Sumardjo, 2013).

Filsafah hidup dari *Pikukuh Karuhun* telah menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas setiap Urang Kanekes, menjadi suatu kewajiban yang harus dipegang teguh. Mereka telah menjadikannya sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari, yang tetap kokoh dan tidak tergoyahkan oleh perubahan zaman (Meilani, Syauta, & Sudarman, 2022). Keteguhan masyarakat diiringi juga dengan kesadaran mereka terhadap aturan yang lebih luas di negaranya. Sejak era Kesultanan Banten, masyarakat Kanekes telah secara teratur melakukan silaturahmi atau kunjungan ke Kesultanan Banten sebagai wujud kepatuhan dan pengakuan terhadap otoritas penguasa mereka. Kegiatan adat tersebut dinamakan *Seba* yang merupakan puncak pesta panen masyarakat Kanekes dengan melakukan persembahan suci, yaitu *laksa* dan hasil bumi mereka kepada penguasa (pemimpin daerah) (Isnendes, Upacara Seba Baduy: Sebuah Perjalanan Politik Masyarakat Adat Sunda Wiwitan, 2016). Sementara sudut pandang lain mengatakan bahwa tradisi *Seba* ini merupakan sistem komunikasi masyarakat Kanekes dengan dunia luar khususnya pada penguasa/pemerintah.

Sejarah mencatat bahwa tradisi *Seba* telah dilakukan sejak masa pemerintahan Raja Sunda. Namun, setelah runtuhnya Kerajaan Sunda, *Seba* kemudian dipersembahkan kepada Sultan Banten sebagai bentuk "kontak politik" pada abad keenam belas, atau setelah kejatuhan Padjadjaran. *Seba* dianggap sebagai simbol kesepakatan antara para pemimpin Kanekes (*pu'un*) dengan Sultan Banten, menegaskan ketaatan masyarakat Kanekes terhadap pemerintahan Kesultanan (Isnendes, Upacara Seba Baduy: Sebuah Perjalanan Politik Masyarakat Adat Sunda

Wiwitan, 2016). Sejak saat itu, tradisi *Seba* terus dijalankan walaupun penguasanya berubah dari jaman Belanda hingga sekarang. Tradisi *Seba* tetap dipertahankan dengan mengirimkan hasil bumi seperti padi yang diolah menjadi laksa, palawija, pisang, beras ketan, gula aren, madu, dan berbagai jenis buah-buahan. Selain itu, ada pula persembahan seperangkat alat dapur seperti *bakul*, *centong*, *nyiru*, *dulang* dan sejenisnya yang dibuat oleh masyarakat Kanekes untuk persembahan kepada Bupati Lebak, Bupati Pandeglang, Bupati Serang dan Gubernur Banten (Mushowwir, 2013).

### ***Seba Baduy* sebagai Eksistensi Masyarakat Adat Kanekes pada Masyarakat Luar**

Modernitas dan pembangunan yang sedang menjamur diberbagai sudut daerah Indonesia menjadi ancaman terhadap sistem sosial dan budaya masyarakat adat, karena dapat menggiring mereka pada gaya hidup yang konsumtif dan kehilangan identitas budayanya (Yuliana, Ruja, & Ratnawati, 2021). Atas kondisi inilah ketaatan masyarakat Kanekes diekspresikan melalui tradisi *Seba* sebagai bentuk perlawanan dan penolakan terhadap segala perkembangan dari luar yang dapat mengancam eksistensi mereka. *Seba* atau sering disebut *Seba Baduy* merupakan rangkaian upacara adat yang dilakukan oleh masyarakat Kanekes sebagai perwujudan kesetiaan dan ketaatan mereka terhadap pemerintah RI yang secara simbolis dilakukan kepada kepala pemerintah daerah seperti Bupati dan Gubernur Banten (Afina, 2022). Tradisi *Seba Baduy* juga dimaknai sebagai ekspresi rasa syukur dan penghormatan masyarakat Kanekes atas hasil panen pertanian dengan mempersembahkannya kepada pemerintah (Rusnandar, 2013). Tradisi *Seba* bersifat wajib dilaksanakan setahun sekali yang ditentukan berdasarkan penanggalan Suku Baduy yaitu antara tanggal 1 sampai 10 bulan Shafar atau setelah seminggu selesai tradisi *ngalaksa* (Isnendes, Upacara *Seba Baduy*: Sebuah Perjalanan Politik Masyarakat Adat Sunda Wiwitan, 2016). Bahkan mantan *Jaro Pamarentah* Ayah Dainah pernah mengatakan bahwa “*carekna bedil dina ceuli, kami mah tetep Seba*” (walaupun senapan ada di telinga, kami tetap melaksanakan *Seba*).

*Seba* sendiri secara harfiah memiliki arti persembahan atau kunjungan resmi masyarakat Kanekes kepada pemerintah atau yang disebut *Bapa Gede* dan *Ibu Gede* (Supriatna, 2012). *Seba* dilakukan setelah upacara *Kawalu* dan *Ngalaksa*, yaitu

kegiatan berpuasa *Kawalu* dan bersilahturami kepada kerabat atau tetangga mereka dengan membawa hasil panen untuk membuat laksa. *Ngalaksa* atau membuat laksa dibuat oleh para wanita dengan proses panjang dari pengumpulan padi oleh setiap kepala keluarga dengan menyesuaikan jumlah ikat padi dengan jumlah anggota keluarga hingga menumbuk beras menjadi tepung (Afina, 2022). Tepung yang digunakan untuk membuat laksa harus dihasilkan dari tujuh rumpun padi yang ditanam di ladang suci (*huma serang*) di kampung Baduy Tangtu dan ladang teladan (*huma tuladan*) di kampung Baduy Penamping (Supriatna, 2012). *Kawalu* dan *Ngalaksa* ini merupakan salah satu rangkaian persiapan sebelum dilaksanakannya upacara *Seba*.

Dalam rangkaianannya *Seba* terbagi menjadi dua upacara ritual adat, *Seba* ke *Bapa Gede*, yaitu ke Bupati Lebak dan Bupati Pandeglang disebut *Seba Leutik* (*Seba* kecil) dan *Seba* ke *Ibu Gede*, yaitu Gubernur Banten disebut *Seba Ageung* (*Seba* besar). Pada *Seba Leutik* (*Seba* kecil) biasanya tidak banyak diikuti oleh masyarakat Baduy Dalam bahkan terkadang hanya melibatkan Baduy Luar saja. Meskipun demikian, baik dalam pelaksanaan maupun tujuannya, praktek tersebut tetap konsisten dalam menyampaikan amanat Wiwitan, yang berupa pesan untuk saling mengingatkan, melaporkan, dan mendoakan secara lahir dan batin agar manusia, bangsa, dan negara tetap aman, tentram, serta terhindar dari bencana dan kerusakan alam (Mushowwir, 2013).

Proses pelaksanaan *Seba* hanya dilakukan oleh laki-laki saja, sedangkan para perempuan bertugas menyiapkan segala macam persembahan untuk dibawa saat *Seba* tiba. Pada pelaksanaannya terdapat perbedaan antara Baduy Dalam dan Baduy Luar, dimulai saat *Nglaksa* hingga selesai *Seba*. Adapun perbedaan tersebut dijelaskan pada tabel berikut: (Isnendes, Upacara Seba Baduy: Sebuah Perjalanan Politik Masyarakat Adat Sunda Wiwitan, 2016).

**Tabel 1. Rangkaian Upacara Seba**

Hari Ke-	Baduy Dalam	Baduy Luar
Ke-1	Mereka turun dari pegunungan dan menginap di Baduy Luar, di rumah <i>Jaro Pamarentah</i> , sambil membawa hasil panen yang digabungkan dengan panen Baduy Luar untuk diangkut dengan mobil.	Sambil menyiapkan hasil panen, mereka juga melakukan pendataan terhadap masyarakat Baduy Luar yang akan bergabung dalam perjalanan <i>Seba</i> .
Ke-2	Memulai kegiatan dengan <i>Ngabaduy</i> (berjalan beriringan ke belakang) di halaman rumah <i>Jaro Pamarentah</i> dan mulai perjalanan dengan berjalan kaki ( <i>lalampah</i> ) menuju Kantor Pemerintahan Kabupaten	Melakukan <i>Ngarompes</i> atau mempersiapkan hasil panen, seperti mengumpulkan pisang, membungkus gula merah dan sebagainya di depan rumah <i>Jaro Pamarentah</i> .

	<p>Lebak (Alun – alun Rangkasbitung) sekitar 9 jam.</p>	<p>Masyarakat Baduy Luar yang ikut <i>Seba</i> berangkat dengan mobil yang disediakan pemerintah beserta hasil panen dan sesembahan yang mereka bawa.</p> <p>Setelah sampai di lapangan atau alun – alun Rangkasbitung, mereka membaur dengan Baduy Dalam dan persiapan <i>Seba</i> di Kabupaten Lebak.</p>
	<p>Malamnya Baduy Luar maupun Baduy Dalam melaksanakan <i>Seba</i> di pendopo Kantor Bupati Kabupaten Lebak:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembukaan</li> <li>2. <i>Seba</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembacaan Mantra (<i>Rajah</i>) oleh <i>Jaro Warega</i></li> <li>- Penyerahan <i>laksa</i> secara simbolis oleh warga Baduy kepada Bupati</li> </ul> </li> <li>3. Penyambutan Bupati Lebak</li> <li>4. Dialog</li> <li>5. Penyerahan bantuan pangan pokok dari Bupati</li> <li>6. Penutup</li> </ol>	
Ke-3	<p>Berangkat <i>lalampah</i> kembali menuju Gubernur Provinsi Banten.</p>	<p>Mereka berangkat menggunakan mobil bis atau truk yang disediakan oleh Bupati Lebak menuju Gedung Disparbud Provinsi Banten.</p> <p><i>Jaro Pamarentah, Jaro Warega, dan Kasepuhan Baduy Luar</i> bergerak menuju Kabupaten Pandeglang untuk mengadakan upacara <i>Seba</i> di pendopo Kabupaten Pandeglang, yang merupakan rangkaian acara serupa dengan yang diadakan di Kabupaten Lebak. Setelah <i>Seba</i> selesai di Kabupaten Pandeglang, mereka melanjutkan perjalanan menuju Gedung Disparbud Provinsi Banten.</p> <p>Setibanya di Gedung Disparbud Provinsi Banten, mereka kemudian makan siang dan beristirahat.</p> <p>Baduy Luar dan Baduy Dalam bersama – sama berjalan kaki menuju Gubenuran dan beristirahat di sana. Sembari persiapan <i>Seba</i> masyarakat Baduy Luar maupun Baduy Dalam menikmati hiburan musik dan festival yang disediakan gubernur di alun – alun Kota Serang, mereka pun berbaur dengan masyarakat sekitar yang ikut menikmati acara hiburan dan perayaan <i>Seba</i> tersebut.</p> <p>Malamnya dimulai <i>Seba</i> ke Gubernur Provinsi Banten di Pendopo Kantor Gubernur Kota Serang Banten (rangkain acara sama seperti di Kabupaten Lebak).</p> <p>Setelah selesai, acara dilanjutkan dengan hiburan Wayang Golek dan istirahat.</p>
Ke-4	<p>Masyarakat Baduy Dalam dan Kasepuhan Baduy Luar melakukan perjalanan ke Karesidenan Banten untuk melaksanakan <i>Seba</i>, sebuah rangkaian acara yang serupa dengan yang dilakukan di Kabupaten Lebak.</p> <p>Masyarakat Baduy Luar bersiap untuk pulang dengan menggunakan bis atau truk yang disediakan oleh Gubernur Banten.</p>	<p>Masyarakat Baduy Dalam pulang dengan berjalan kaki (<i>lalampah</i>) menuju Desa Kanekes</p> <p>Masyarakat Baduy Luar pulang dengan bis/truk menuju Terminal Ciboleger Desa Kanekes</p>
Ke-5	<p>Setelah perjalanan <i>lalampah</i> selama 18 jam, masyarakat Baduy Dalam akhirnya tiba kembali di rumah masing-masing.</p>	-

Tradisi *Seba* pada hakikatnya tidak hanya dilakukan pada pemerintah saja, akan tetapi sebelumnya *Seba* dilakukan terlebih dahulu oleh masyarakat Baduy Dalam ke Dangka dan dari *Jaro Dangka* ke *Jaro Warega* (Isnendes, Upacara Seba Baduy: Sebuah Perjalanan Politik Masyarakat Adat Sunda Wiwitan, 2016). Maka dari itu, tahapan *Seba* terdiri dari tiga tahapan sebelum akhirnya *Seba* keluar wilayah Baduy, berikut penjelasannya (Kurnia & Sihabudin, 2010):

1. *Seba* tahap pertama dilakukan dari Baduy Dalam menuju Dangka dengan rute yang meliputi Cibeo *Seba* ke Dangka Cipatik/Cihulu, Cikartawana *Seba* ke Dangka Panyaweuyan, dan Cikeusik *Seba* ke Dangka Cibengkung/Padawaras.
2. Tahap kedua adalah pelaksanaan *Seba* oleh para *Jaro Dangka* menuju *Jaro Warega*.
3. Puncak dari pelaksanaan *Seba* adalah tahap ketiga, di mana *Seba* dilakukan oleh masyarakat Baduy ke pemerintahan, dimulai dari Kecamatan, lalu ke Kabupaten (Lebak, Pandeglang, Serang), dan terakhir kepada Gubernur.

### ***Seba Baduy sebagai Komunikasi Antarbudaya***

Pelaksanaan *Seba* setiap tahunnya memiliki tema yang berbeda-beda menyesuaikan kondisi dan situasi saat *Seba*. Misalnya saja, pada *Seba* tahun 2021 dilakukan ditengah–tengah pandemi Covid-19 tema yang diusung adalah “Ketahanan Budaya di Tengah Pagebluk Corona” (dinsos.lebak.go.id, 2021). Pelaksanaan *Seba* pun dilaksanakan secara terbatas, jumlah peserta (masyarakat Baduy) yang ikut pun dibatasi yang biasanya mencapai ribuan orang pada pandemi hanya sekitar 17-20 orang saja (Suryana, 2021). Meskipun begitu, rangkaian dan tujuan *Seba* tetap konsisten, yaitu menyampaikan amanat leluhur yang harus dijalankan sebagai kewajiban yang menjadi nilai kehidupan bagi masyarakat Baduy, pemerintah, dan seluruh komunitas yang harus diselesaikan (Isnendes, Upacara Seba Baduy: Sebuah Perjalanan Politik Masyarakat Adat Sunda Wiwitan, 2016).



(a)



(b)

**Gambar 3. Perayaan *Seba* Baduy menyesuaikan kondisi dan situasi masyarakat (a) *Seba* Baduy 2016 Kepada Gubernur Banten, (b) *Seba* Baduy 2021 Kepada Bupati Lebak (Saat Pandemi Covid-19)**

Sumber: *Gambar (a)* (Zein, 2016), *Gambar (b)* (Nazmudin & Ika, 2021)

Setiap rangkaian dan kegiatan *Seba* terdapat simbol–simbol dan perilaku non verbal yang mengandung nilai kehidupan dan makna tertentu khususnya sebagai cara komunikasi masyarakat Kanekes dengan dunia luar (Mushowwir, 2013). Simbol tersebut dapat terlihat pada pakaian adat yang digunakan, persembahan hasil bumi dan kerajinan serta alat musik untuk menunjukkan identitas budaya mereka yang unik dan untuk mendapatkan pengakuan serta penghormatan dari masyarakat luar. Hal ini penting dalam konteks komunikasi antarbudaya karena mendorong pemahaman dan penghargaan lintas budaya. Selain itu, makna dibalik setiap rangkaian kegiatan menandakan penghormatan dan ketaatan masyarakat Kanekes kepada pemerintah daerah. Menekankan pentingnya hidup rukun dan harmonis antara sesama manusia dan alam merupakan pesan universal yang dapat dipahami dan dihargai oleh berbagai budaya, seperti kelestarian lingkungan, perlindungan budaya, dan kesejahteraan masyarakat adat. Ini adalah bentuk komunikasi langsung yang memadukan elemen tradisional dengan struktur pemerintahan modern. Unsur komunikasi lainnya bisa terlihat pada interaksi masyarakat Kanekes dengan pihak luar yang mungkin tidak berbicara bahasa Sunda, sehingga terjadi proses komunikasi lintas bahasa. Melalui tradisi *Seba* juga masyarakat Baduy menunjukkan kemampuan mereka untuk tetap mempertahankan tradisi sambil beradaptasi dengan perubahan zaman dan interaksi dengan dunia luar. Ini adalah bentuk komunikasi antarbudaya yang dinamis dan adaptif.

Upacara *Seba* Baduy, dengan berbagai simbol dan maknanya, merupakan manifestasi yang kaya akan komunikasi antarbudaya. Ini menunjukkan bagaimana masyarakat adat dapat berinteraksi dan berkomunikasi dengan budaya lain tanpa

kehilangan jati diri mereka. Sedangkan menurut Ayah Mursid (wakil *Jaro Cibeo*) nilai yang terdapat pada tradisi *Seba* berkaitan erat dengan urgensi dan esensi terhadap perlindungan alam dan posisi mereka sebagai masyarakat adat dalam masyarakat dan negara, adapun penjelasannya sebagai berikut: (Kurnia & Sihabudin, 2010)

1. *Seba* adalah upacara keagamaan yang bersifat wajib bagi seluruh masyarakat Kanekes/Baduy (Dalam maupun Luar).
2. *Seba* adalah sebuah tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi.
3. *Seba* merupakan silaturahmi masyarakat Kanekes kepada para pemimpin daerah (*Ratu dan Menak*).
4. *Seba* tidak sembarang dilaksanakan karena memiliki aturan khusus melalui musyawarah dan permifakatan berdasarkan *pikukuh karuhun*.
5. *Seba* bukan penyerahan upeti karena sejak awal tidak adanya peperangan antara masyarakat Kanekes dengan pemerintah. *Seba* adalah ekspresi penghormatan dan penghargaan dari masyarakat Baduy, sebagai ungkapan syukur dan kebahagiaan mereka atas pelaksanaan rukun agama dengan penuh kesungguhan.
6. *Seba* adalah upaya untuk menyampaikan pesan dari leluhur kepada pemerintah, dengan harapan saling mengingatkan dan mendoakan agar terhindar dari bencana serta kerusakan alam.
7. *Seba* menjadi alat untuk menyampaikan misi, visi, harapan, keluhan, dan keinginan masyarakat Kanekes kepada pemerintah, dengan harapan agar menjadi pertimbangan dan kewajiban bagi pemerintah dalam melindungi hak-hak masyarakat adat dan tanah *ulayat*.

Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan dari *Jaro Warega (Jaro Tanggungan Dua Belas)* yang menjelaskan pentingnya *Seba* bagi masyarakat Kanekes (Kurnia & Sihabudin, 2010).

*“Bisi engke dina hiji waktu atawa jaman, Seba euweuh nu narima, poma kudu tetep dilaksanakeun sanajan ngan tutunggul jeung dahan sapapan nu nyaksian”*

Artinya:

*Jika suatu waktu atau pada suatu jaman, Seba tidak ada yang mau menerima, tetaplah harus dilaksanakan walaupun hanya tunggul pohon atau sebatang kayu yang menjadi saksinya.*

Bagi masyarakat Baduy Luar, *Seba* selalu dinanti dan menjadi pengalaman berharga karena merupakan pengalaman berharga bisa pergi ke kota dan melihat beragam macam budaya yang berbeda dari mereka. Hal ini dapat terlihat saat mereka menikmati konser musik yang disediakan pemerintah untuk menghibur masyarakat Kanekes maupun masyarakat yang ingin melihat *Seba*. Komunikasi antarbudaya antara masyarakat Kanekes dan masyarakat umum yang tak jarang terlihat berinteraksi dan berkomunikasi bersama. Sedangkan bagi masyarakat Baduy Dalam upacara *Seba* dimaknai sebagai kepatuhan mereka terhadap amanat dari *pikukuh karuhun* yang wajib dilakukan dan diselesaikan bagaimanapun kondisinya (Isnendes, Upacara *Seba* Baduy: Sebuah Perjalanan Politik Masyarakat Adat Sunda Wiwitan, 2016).

Ketertarikan masyarakat umum sangat tinggi terhadap rangkaian tradisi *Seba* karena sangat unik dan memberikan nilai positif kepada masyarakat sebagai wawasan baru. Selain itu, *Seba* juga dinilai memberikan manfaat terkait pelestarian kebudayaan lokal dan menjaga tali silaturahmi antara suku Baduy dengan birokrat dan pemerintah. *Seba*, yang merupakan ungkapan rasa syukur, juga mengingatkan masyarakat akan pentingnya selalu bersyukur atas segala keberkahan yang dianugerahkan oleh Maha Kuasa. Masyarakat juga menganggap bahwa adanya *Seba* menunjukkan adanya perlindungan terhadap masyarakat adat sehingga mencegah terjadinya konflik. Selain itu, *Seba* juga menggambarkan toleransi dan keharmonisan antara masyarakat Kanekes, masyarakat umum dan pemerintah, Karena pada prinsipnya, masyarakat Kanekes merupakan bagian integral dari masyarakat Indonesia yang memerlukan perlindungan dan memiliki hak-hak yang sama dengan masyarakat umum lainnya (Rafik, Bayuni, Utari, & Rifqiwati, 2023).



## **Kesimpulan**

Kesimpulan dari artikel ini adalah bahwa tradisi *Seba Baduy* merupakan bentuk komunikasi antarbudaya yang penting dan simbol eksistensi kearifan lokal yang patut dijaga dan dilestarikan. Upacara ini tidak hanya menjadi sarana bagi masyarakat adat Kanekes untuk menyampaikan pesan-pesan leluhur tentang pentingnya menjaga alam, keharmonisan, dan kedamaian, tetapi juga menjadi medium interaksi dan dialog antara masyarakat adat dan pihak luar, termasuk pemerintah dan masyarakat umum. Melalui tradisi *Seba*, identitas dan keunikan budaya masyarakat Kanekes ditampilkan secara jelas, memperkuat eksistensi mereka di tengah keragaman masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, menjaga dan melestarikan tradisi *Seba Baduy* adalah langkah penting dalam memperkuat komunikasi lintas budaya dan mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal yang berharga.

## **Referensi**

- Afina, S. (2022, September 23). *Seba Badui Cara Urang Kanekes Mencintai Negeri*. Retrieved from Kementerian Keuangan Republik Indonesia Kanwil DJKN Banten: [https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-banten/baca-artikel/15412/Seba-Badui-Cara-Urang-Kanekes-Mencintai-Negeri.html#:~:text=Seba%20\(artinya%20persembahan\)%20merupakan%20rangkaian,panen%20membuat%20makanan%20Laksa](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-banten/baca-artikel/15412/Seba-Badui-Cara-Urang-Kanekes-Mencintai-Negeri.html#:~:text=Seba%20(artinya%20persembahan)%20merupakan%20rangkaian,panen%20membuat%20makanan%20Laksa)).
- Andriani, W. (2021). Penggunaan Metode Sistematis Literatur Review dalam Penelitian Ilmu Sosiologi. *Jurnal PTK dan Pendidikan Vol.7 No.2*.
- Ardhi, S. (2023, September 25). *Menilik Konflik Rempang dan Pengakuan Pemerintah atas Hak - hak Masyarakat Adat*. Retrieved from Universitas Gadjah Mada: <https://ugm.ac.id/id/berita/menilik-konflik-rempang-dan-pengakuan-pemerintah-atas-hak-hak-masyarakat-adat>.
- Ardiyansah, & Robby, U. B. (2023). Partisipasi Publik Berbasis Nilai Budaya Masyarakat Adat Baduy: Upaya Pelestarian Lingkungan. *Reformasi Vol.14 No.2*, 261-273.
- Armawi, A., & Susilawati, D. (2021). Konstruksi Identitas Nasionalisme dalam Pikukuh dan Buyut Masyarakat Adat Baduy. *Paradigma: Jurnal Kajian Budaya Vol.11 No.2*, 151-166.
- DA, A. T. (2023, Agustus 11). *Belum Adanya Pengakuan Pemerintah atas Puluhan Juta Hektar Wilayah Hukum Adat*. Retrieved from hukumonline.com: <https://www.hukumonline.com/berita/a/belum-adanya-pengakuan-pemerintah-atas-puluhan-juta-hektar-wilayah-hukum-adat-1f64d5a7ab14493/?page=2>.
- Dahlan, M. A. (2019). Orang Baduy dalam Lintasan Politik Indonesia. *Jurnal Ilmiah Rinjani Vol.7 No.1*, 1-10.

- Desandro, M. B. (2021). *Analisis Strategi Komunikasi Pemasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Lebak dalam Mempromosikan Event Wisata Seba Baduy*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- dinsos.lebak.go.id. (2021, Mei 21). *Ditengah Pandemi Covid-19 Seba Baduy 2021 Dilaksanakan Secara Terbatas*. Retrieved from Pemerintah Kabupaten Lebak Dinas Sosial: <https://dinsos.lebakkab.go.id/detail/ditengah-pandemi-covid-19-seba-baduy-2021-dilaksanakan-secara-terbatas>.
- Farakhiyah, R., & Irfan, M. (2019). Eksistensi Masyarakat Adat Tergerus oleh Kebutuhan Zaman. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Vol.1 No.1*, 44-54.
- Fitri, M. R. (2023). Keselarasan Kehidupan Masyarakat Baduy untuk Pencapaian SDGs. *Konferensi Nasional Sosiologi X APSSI Vol.1 No.2* (pp. 245-150). Kupang: [www.pkns.portalapssi.id](http://www.pkns.portalapssi.id).
- Holillah, I., & Heryatun, Y. (2019). *Komunikasi antar Budaya dan Kearifan Lokal Eksistensi Masyarakat Baduy Menghadapi Agresi Modernitas*. Serang: Pusat Penelitian dan Penerbitan (Puslitpen) UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten.
- Isnendes, R. (2016). Upacara Seba Baduy: Sebuah Perjalanan Politik Masyarakat Adat Sunda Wiwitan. *Jurnal Masyarakat & Budaya Vol.18 Vol.2*, 203-2014.
- Kurnia, A., & Sihabudin, A. (2010). *Saatnya Baduy Bicara*. Banten: Bumi Aksara dan UNTIRTA.
- Lagu, M. (2016). Komunikasi antar Budaya di Kalangan Mahasiswa Etnik Papua dan Etnik Manado di Universitas Sam Ratulangi Manado. *Acta Diurna Vol.5 No.3*.
- Mawangi, G. T. (2022, Juni 8). *APHA: Akar Konflik Adat Disebabkan Ketidakpastian Batas Hak Ulayat*. Retrieved from ANTARA Kantor Berita Indonesia: <https://www.antaraneews.com/berita/2927701/apha-akar-konflik-adat-disebabkan-ketidakpastian-batas-hak-ulayat>.
- Meilani, Syauta, J., & Sudarman, J. (2022). Pikukuh Karuhun Suku Baduy: Sebuah Refleksi Alkitab tentang Memelihara Warisan Leluhur. *Magnum Opus (Jurnal Teologu dan Kepemimpinan Kristen) Vol.3 No.2*, 104-112.
- Muhibah, S., & Rohimah, R. B. (2023). Mengenal Karakteristik Suku Baduy Dalam dan Suku Baduy Luar. *Jawara (Jurnal Pendidikan Karakter) Vol.9 No.1*, 73-85.
- Mushowwir, A. (2013). *Komunikasi Ritual Adat Seba Masyarakat Baduy Luar*. Bandung: Universitas Komputer Indonesia.
- Nadroh, S. (2018). Pikukuh Karuhun Baduy Dinamika Kearifan Lokal di Tengah Modernitas Zaman. *Jurnal Pasupati Vol.5 No.2*, 196-216.
- Nazmudin, A., & Ika, A. (2021, Mei 21). *Gelar Tradisi Seba Baduy Secara Sederhana Saat Pandemi, Bupati Lebak Minta Maaf*. Retrieved from Kompas.com: <https://regional.kompas.com/read/2021/05/21/184543378/gelar-tradisi-seba-baduy-secara-sederhana-saat-pandemi-bupati-lebak-minta>.
- Pawestri, P. (2023, Juni 6). *Pakaian Adat Suku Baduy Luar, Ada Kampret sebagai Atasan Para Lelakinya*. Retrieved from Tangerang Daily: <https://tangerangdaily.id/pakaian-adat-suku-baduy-luar-ada-kampret-sebagai-atasan-para-lelakinya>.

- Pitriyani. (2019). *Fungsional Konflik di Desa Batu Badak Kecamatan Margasekampung Kabupaten Lampung Timur*. Serang: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Rafik, M., Bayuni, M., Utari, E., & Rifqiawati, I. (2023). Pandangan Masyarakat Umum terhadap Nilai Moral Upacara Seba Baduy. *Jurnal Budaya Nusantara Vol.6 No.1*, 233-239.
- Rahman, R. (2017). Konflik Masyarakat dengan Pemerintah (Studi Kasus Sengketa Tanah Adat). *Sosioreligius Vol.3 No.1*, 41-48.
- Raja Wisata. (2023, Juni 8). *Fakta Menarik Masyarakat Suku Baduy di Pedalaman Banten*. Retrieved from Raja Wisata: <https://raja-wisata.com/fakta-menarik-masyarakat-suku-baduy-di-pedalaman-banten>.
- Rusnandar, N. (2013). Seba: Pucak Ritual Masyarakat Baduy di Kabupaten Lebak Provinsi Banten. *Patanjala Vol.5 No.1*, 83-100.
- Sinaga, N. (2024, Januari 24). *60 Tahun Konflik Agraria antara Masyarakat Adat Humbang Hasundutan dan KLHK*. Retrieved from Kompas.id Reforma Agraria: <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/01/14/60-tahun-konflik-agraria-masyarakat-adat-humbang-hasundutan-dan-klhk>.
- Sumardjo, J. (2013, Desember 11). *Makna Amanah Buyut Menurut Prof. Jakob Sumardjo*. Retrieved from Sundanologi (Sarana Pengembangan Budaya Sunda): <https://sundanologi.wordpress.com/2013/12/11/makna-amanah-buyut-menurut-prof-jakob-sumardjo>.
- Suparmini, Setyawati, S., & Suminar, D. R. (2013). Pelestarian Lingkungan Masyarakat Baduy Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Penelitian Humaniora Vol.18 No.1*.
- Supriatna, E. (2012). Upacara Seba pada Masyarakat Baduy. *Patanjala Vol.4 No.3*, 481-496.
- Suranto. (2010). *Komunikasi Sosial Budaya*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suryana, M. (2021, Mei 17). *Masyarakat Badui Gelar Tradisi Seba di Tengah Pandemi Covid-19*. Retrieved from Antara (Humaniora): <https://www.antaraneews.com/berita/2160646/masyarakat-badui-gelar-tradisi-seba-di-tengah-pandemi-covid-19>.
- Tahmaseb-McConatha, J. (2023). The Gendered Face of Ageism in the Workplace. *Advances in Social Sciences Research Journal Vol.10 No.1*, 528-536.
- Utari. (2020, September 30). *Tiga Masalah Utama Masyarakat Adat*. Retrieved from Komnas HAM RI: <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/9/30/1580/tiga-masalah-utama-masyarakat-adat.html>.
- Yuliana, L., Ruja, I. N., & Ratnawati, N. (2021). Perubahan Sosial Masyarakat Pasca Dibangunnya Pabrik Rokok Mahayana di Desa Sumpersuko Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang. *Entita: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu - ilmu Sosial Vol.3 No.2*.

Zein, H. (2016, Agustus 9). *Seba, Ungkapan Cinta Tahunan Suku Baduy*. Retrieved from Coklatkita.com: <https://www.coklatkita.com/index.php/wisata/seba-ungkapan-cinta-tahunan-suku-baduy>.